

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah yang menjadi perhatian banyak negara, termasuk di Indonesia. Menurut Cahyat, A., Gonner, C., & Haug, M. (2007) kemiskinan adalah situasi seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sementara lingkungan mereka kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan atau keluar dari kerentanan. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 adalah 7,62% dari 49,94 juta jiwa jumlah penduduk, dengan 3,8 juta Penduduk miskin di Kota Bandung pada tahun 2023 berjumlah 245.000 jiwa, dan di Kecamatan Bandung Kulon berjumlah 8.034 jiwa. Di tengah kondisi ini, kelompok miskin dikhawatirkan semakin rendah aksesnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan usaha apa yang perlu dilakukan untuk membantu mereka agar tidak semakin ringkih dan tersisih. Penghasilan kelompok miskin, sering kali, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, menunjukkan keterbatasan finansial yang mereka alami. Dalam rangka mengatasi hal itu, pemerintah perlu menemukan cara agar penghasilan yang diperoleh kelompok miskin tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan “perut”, tetapi juga masih dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, seperti kesehatan dan pendidikan. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya stimulan tertentu sehingga mereka bersedia menyimpan sebagian penghasilannya bagi pemenuhan kebutuhan yang lain.

Telah lama disadari bahwa usaha membangun masyarakat tidak sekadar terbatas pada pengenalan dan implementasi proyek-proyek fisik atau alokasi dana dan subsidi, melainkan juga melibatkan gerakan perubahan dan mobilisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi terbentuknya masyarakat mandiri. Kegiatan membangun masyarakat ini erat kaitannya dengan memberdayakan masyarakat, karena selain bertujuan untuk melawan kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat agar menjadi lebih aktif dan berinisiatif. Oleh karena itu, perencanaan dan implementasi pemberdayaan seharusnya mencakup upaya untuk memberdayakan mereka sehingga memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ini tidak hanya mencakup pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan usaha yang mencakup berbagai macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Dengan demikian, semua anggota masyarakat dapat merasa mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung pada program bantuan.

Peran pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong ke arah pembangunan. Pemerintah memulai berbagai program untuk mengakhiri kemiskinan. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2002 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk mengatasi kemiskinan, berbagai program diluncurkan. Di Indonesia, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan pasal 1 ayat I

mengemukakan bahwa program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). PKH memiliki tiga tujuan: jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk mengurangi beban pengeluaran yang ditanggung oleh masyarakat miskin. Tujuan jangka menengah adalah untuk menciptakan perubahan perilaku peserta PKH dengan memberi mereka akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sehingga mereka dapat menghasilkan generasi yang lebih cerdas. Tujuan jangka panjang adalah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Mekanisme pelaksanaan PKH yang terdiri dari berbagai tahapan, salah satunya transformasi ke peserta PKH yang merupakan proses pengakhiran menjadi KPM PKH melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi. Kegiatan pemutakhiran ini meliputi pendataan ulang dan evaluasi status ke peserta dan sosial ekonomi KPM PKH untuk menentukan apakah KPM tersebut berstatus transisi atau graduasi. Graduasi berkaitan dengan prasyarat menjadi KPM selain kelompok miskin dan rentan yang memiliki komponen. Jika, kondisi KPM tidak memiliki komponen tersebut KPM akan graduasi secara alamiah. Selanjutnya, KPM yang sudah memulai usaha skala kecil dan berjalan lancar sehingga mereka merasa mampu dan mengundurkan diri disebut KPM graduasi mandiri, berdasarkan data sosial ekonomi yang diperbarui.

Kelurahan Cigondewah Rahayu memiliki jumlah penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) sebanyak 393 KPM, beberapa di antara KPM tersebut sudah melakukan graduasi mandiri baik secara inisiatif sendiri maupun dorongan dari pendamping PKH karena perputaran roda perekonomian seperti berwirausaha secara mandiri membuat segelintir KPM merasa dirinya sudah tidak berhak mendapatkan bantuan pemerintah, sehingga KPM secara sukarela mengeluarkan diri dari PKH. Meskipun beberapa KPM yang telah graduasi mandiri menghasilkan peningkatan ekonomi yang signifikan, sering kali ditemukan masalah terkait kemunduran usaha yang dimiliki oleh KPM karena kurangnya kreativitas, kecenderungan untuk menyerah, dan kurangnya pemantauan langsung oleh pendamping program keluarga harapan terhadap KPM yang telah graduasi mandiri.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki keterkaitan dan relevansi yang erat dengan konsep pemberdayaan dalam penguatan peran keluarga. Konsep pemberdayaan juga mencakup penguatan peran keluarga dalam memenuhi fungsi-fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi karena program ini bukan hanya memberikan dana tunai kepada keluarga yang ada di rumah tangga miskin, melainkan juga keluarga harus menjalankan kewajiban yang ditentukan oleh PKH seperti kehadiran pada layanan kesehatan dan layanan pendidikan. PKH memberikan dukungan kepada keluarga untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan peran-peran tersebut secara efektif. Melalui bantuan yang diberikan, PKH dapat membantu keluarga menjadi lebih mandiri dalam mengelola kebutuhan dan masalah internal mereka.

Kemandirian keluarga adalah sikap mental yang mencakup tanggung jawab, independensi, otonomi, dan kebebasan dalam mengambil keputusan, serta memiliki keterampilan memecahkan masalah. Hal ini melibatkan kemampuan keluarga untuk mengatur perekonomiannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal dan menghadapi tantangan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, serta mengatasi tekanan lingkungan sosial. Dengan memiliki kemandirian yang kuat, keluarga mampu meningkatkan daya tahan ekonomi dan kapabilitas dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial, baik dalam konteks ekonomi maupun non-ekonomi, hal ini didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh (Parker, 2006, hal. 234-237). Oleh karena itu, KPM yang sebelumnya bergantung pada berbagai bantuan pemerintah harus dapat bertahan sendiri dan tidak bergantung pada bantuan dari orang lain. Dengan demikian, PKH membantu memperkuat ikatan dan hubungan antar anggota keluarga serta memberi mereka kontrol atas arah dan keputusan dalam kehidupan mereka. Ini mencerminkan kemandirian keluarga yang memungkinkan keluarga untuk berusaha dan mempertahankan usaha tersebut dalam menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari.

Peneliti tertarik pada kemandirian KPM yang telah graduasi secara mandiri karena berhasil mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan program PKH serta juga beberapa masalah yang dihadapi oleh KPM pasca melakukan graduasi mandiri. Bertitik tolak dari permasalahan dan teori di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Graduasi Mandiri Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, pokok permasalahan penelitian adalah “Bagaimana kemandirian keluarga penerima manfaat graduasi mandiri program keluarga harapan di Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung?”. Selanjutnya pokok permasalahan tersebut dirinci ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana tanggung jawab keluarga penerima manfaat graduasi mandiri program keluarga harapan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari?
3. Bagaimana independensi keluarga penerima manfaat graduasi mandiri program keluarga harapan di Kelurahan Cigondewah Rahayu?
4. Bagaimana otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan keluarga penerima manfaat graduasi mandiri program keluarga harapan di Kelurahan Cigondewah Rahayu?
5. Bagaimana keterampilan memecahkan masalah keluarga penerima manfaat graduasi mandiri program keluarga harapan di Kelurahan Cigondewah Rahayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang :

1. Karakteristik informan.
2. Mengetahui tanggung jawab keluarga penerima manfaat PKH pasca graduasi mandiri dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

3. Memahami independensi keluarga penerima manfaat PKH pasca graduasi mandiri.
4. Mengetahui otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan keluarga pasca graduasi mandiri.
5. Mengetahui keterampilan memecahkan masalah keluarga dalam berusaha menghadapi tantangan pasca graduasi mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan dan praktik pekerjaan sosial dalam bidang pelayanan sosial kemiskinan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah mengenai kegiatan graduasi mandiri di Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika pedoman penelitian penulisan karya ilmiah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang Latar Belakang; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, memuat tentang Penelitian Terdahulu; dan Teori Relevan dengan Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang Desain Penelitian; Penjelasan Istilah; Latar Penelitian; Sumber Data dan Cara Menentukannya; Teknik Pengumpulan Data; Pemeriksaan Keabsahan Data; Teknik Analisa Data; dan Jadwal Penelitian & Langkah-langkah Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang Dasar Pemikiran; Nama Program; Tujuan Program; Sasaran Program; Pelaksana Program; Metode dan Teknik; Kegiatan yang dilakukan; Rencana Anggaran Biaya; Langkah-Langkah Pelaksanaan; Analisis Kelayakan Program; dan Indikator Keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN